


74.4

TERANGSIKAP

52. Terdokumentasi dengan Baik

52
Pengadaan Barang dan Jasa



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
KORIDOR DEWELI PAVILION KALIA 1, BANTUL
KORIDOR DEWELI PAVILION KALIA 1, BANTUL

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13-05/3342/PA/SK/02019
TENTANG:
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
SALINAN KERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2020
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL

Mengingat


1. Untuk agar pelaksanaan Pembayaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2020 dapat dilaksanakan secara lebih efektif, maka ini bertangung jawab, dipandang perlu diberikan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Pengadilan Negeri Bantul
2. Bahwa dalam rangka lebih administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Bantul dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sesuai nama-nama pegawai yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cukup dan menurut dianggap sebagai temakutab dalam angka 2.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406)
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Kesekretariatan Peradilan
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan _____

Media Kita



BUSINESS FILE